

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ida Syamsu Roidah

ABSTRAKSI

Salah satu masalah yang utama dalam pembangunan di Indonesia saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Program-program yang selama ini dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah perlu mengeluarkan sebuah program yang dapat memberikan bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk masyarakat miskin untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin.

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Kebijakan dan memberikan bukti nyata dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan

masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam kemiskinan sangat menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dalam ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto, dkk. 2013).

Kartasasmita (1996) menyebutkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kajian mendesak dilakukan karena program ini didesain bukan hanya untuk memastikan standar hidup keluarga rumah tangga sangat miskin tetap terjaga ketika berhadapan dengan *economic shock*, tetapi juga diharapkan memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Secara ideal tiga Program Keluarga Harapan yang dihadirkan sejak tahun 2007 merupakan program yang ditujukan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program ini merupakan program *conditional cash transfer* (CCT) karena berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan

melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan apabila dalam desain program PKH, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut Pengurus Keluarga. Pemberian dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Namun tidak banyak kajian yang berusaha melihat dampak PKH terhadap relasi gender (*gender impact study*). Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa program CCT ini secara serius menempatkan perempuan sebagai subyek penting dalam pengelolaannya di dalam rumah tangga. Studi awalan tentang *intra household gender relation* pernah dilakukan oleh SMERU Research Institute

(Arif, dkk, 2011). Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan gender di dalam rumah tangga pasca menerima bantuan tunai PKH tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Perempuan di pedesaan maupun perkotaan masih tetap hanya menjadi penyangga suami dalam hal pendapatan keluarga meskipun dapat menentukan alokasi keuangan keluarga. Peran tradisional masih dominan ada pemisahan wilayah *public privat* dan beban ganda perempuan. Laki-laki sebagai penentu besaran alokasi, sedangkan perempuan sebagai eksekutor. Dengan catatan peluang perempuan akan lebih dominan apabila memperoleh pendapatan sendiri. Studi SMERU ditemukan secara umum bahwa PKH bermanfaat untuk semua pihak dalam rumah tangga meski nilai uang lebih berguna di pedesaan daripada di perkotaan. Namun bila dilihat dari relasi gender yang ada, tidak ada perbedaan yang jelas antara rumah tangga penerima dan non penerima PKH. Perempuan yang menerima uang namun tidak semuanya paham betul tentang tanggungjawab mereka. Peran tradisional pun masih berjalan dalam rumah tangga penerima PKH yaitu uang besar untuk laki-laki, sedangkan uang kecil untuk perempuan dan suami masih dominan menentukan alokasi. Meskipun kabar baiknya adalah PKH tidak memicu konflik antara suami dan istri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap relasi masyarakat yang ada di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung; serta mengidentifikasi peluang, tantangan serta harapan bagi masyarakat miskin pada rumah tangga dengan negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari – Juni 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan situs penelitian di UPPKH Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian. Adapun fokus penelitian (1) pelaksanaan PKH di Kecamatan Rejotangan (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan PKH di Kecamatan Rejotangan. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) ada tahapan yang harus dilalui yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan

Di bidang ekonomi, sektor pertanian adalah sektor unggulan bagi ekonomi masyarakat Tulungagung. Walaupun rata-rata mempunyai lahan kering, Tulungagung merupakan sentra produksi berbagai produk pertanian unggulan yang berturut-turut dari skala produksinya adalah padi, jagung, serta tebu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama PDRB Tulungagung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, nilai PDRB dari sektor pertanian adalah sebesar Rp1.387.356.370.000,- atau sebanyak 49.62% dari total PDRB Tulungagung pada tahun yang sama sebesar Rp2.776.256.990.000,-. Setelah sektor pertanian

kontribusi berikutnya adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai PDRB sebesar Rp470.456.810.000,- (17.23%) dan sektor jasa sebanyak Rp378.449.400.000,- (12.4%). Namun demikian, data tahunan menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 4.94% kalah jauh dari pertumbuhan beberapa sektor penting yang lain seperti konstruksi(11.23%), perdagangan, hotel, restoran (8.05%) maupun jasa (8.69%) serta keuangan, persewaan, jasa perusahaan (8.94%). Hal ini penting menjadi catatan untuk pengembangan ekonomi kawasan ke depan.

Dari aspek kesejahteraan, keluarga miskin di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebanyak 4.754 keluarga miskin, sementara pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 6.454 keluarga miskin. Dari jumlah ini sebanyak 1.059 keluarga telah mendapatkan bantuan dari PPFN pada tahun 2013 dan sebanyak 2.451 keluarga mendapatkan bantuan yang sama pada tahun 2014. Dari sebarannya, jumlah terbanyak adalah di Kecamatan Rejotangan yang juga merupakan kecamatan dengan jumlah populasi terbanyak.

2. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Gender

Bagi masyarakat di Kecamatan Rejotangan, pendidikan adalah salah satu pilar penting kehidupan. Dalam masyarakat di kecamatan ini, dua cita-cita utama adalah menyekolahkan anak setinggi-tingginya dan pergi berhaji (sebagai catatan, mengacu dalam BPS dalam Angka tahun 2013, sebanyak 98.63% dari total penduduk di Kecamatan Rejotangan beragama Islam). Sering digambarkan rumah boleh reyot dan miskin, tetapi pendidikan anak menjadi

prioritas dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Rejotangan. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang untuk ukuran sebuah kota kabupaten relative banyak. Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, PPP Kecamatan Rejotangan adalah sebesar Rp 709.880,- dan meningkat menjadi Rp812.720,- pada tahun 2013 dan menjadi Rp915.040,- pada tahun 2014. Namun demikian PPP ini masih kalah jauh dibandingkan dengan PPP Kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung. Distribusi kesejahteraan yang dirinci per desa menunjukkan distribusi di lima desa dengan angka keluarga pra sejahtera tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Keluarga Pra Sejahtera.

No.	Desa	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Jumlah Keluarga Terdata	Presentase
1.	Sumberagung	1.120	2.560	71.59%
2.	Blimbing	790	1.980	54.84%
3.	Rejotangan	670	2.340	46.34%
4.	Pakisrejo	650	2.450	40.38%
5.	Banjarejo	560	1.780	40.01%

Sumber: Data Kecamatan 2016.

Kecamatan Rejotangan dengan jumlah keluarga pra sejahtera terendah adalah Desa Banjarejo sebanyak 560 atau 40.01% keluarga, diikuti oleh Desa Pakisrejo dengan jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 40.38% dan keluarga prasejahtera tertinggi terdapat di Desa Sumberagung dengan 1.120 keluarga.

3. Program Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Arah pengentasan masyarakat miskin melalui PKH sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan Presiden no. 15 Tahun 2010

tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang dari masyarakat melalui pengentasan kemiskinan agar masyarakat miskin mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat benar-benar mampu menjadi masyarakat yang sehat dan cerdas yang kemudian akan membuat keluar dari kemiskinan.

George C. Edward III (2012) mengatakan ada empat variabel atau faktor yang paling krusial dalam implementasi kebijakan publik, pertama adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Edwards III menyebutkan bahwa terdapat beberapa dimensi dalam aspek komunikasi antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Berdasarkan hasil penelitian, proses transmisi dilakukan bukan hanya antara pihak pelaksana kepada pihak kelompok sasaran tetapi juga antara pelaksana. Setelah pelaksana inti di Kecamatan Rejotangandiberikan sosialisasi mengenai PKH pada tahun 2013, sekitar bulan September dilakukan pertemuan

awal beberapa desa di Kecamatan Rejotangan. Bentuk dari sosialisasi pada pertemuan awal yaitu pertemuan secara tatap muka dan secara bersama-sama diberikan materi mengenai pengertian PKH, tujuan PKH, manfaat PKH, serta materi pendukung lain yang menunjukkan kriteria masyarakat miskin yang berhak menjadi peserta PKH. Setelah ada pertemuan awal di Kecamatan Rejotangan yang mengundang semua RTSM dari beberapa desa di Kecamatan Rejotangan. Hal ini dirasa pertemuan awal atau sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Rejotangan tidak efektif dan tidak memberikan pengertian PKH yang memadai bagi RTSM. Selain melakukan sosialisasi kepada peserta PKH, tugas pendamping harus melakukan proses transmisi kepada pihak kesehatan dan pendidikan sebagai mitra PKH di Kecamatan Rejotangan. Pihak peserta PKH di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan mengikuti proses transmisi yang diadakan di Desa. Namun semua peserta PKH di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan tidak ada yang mengikuti pertemuan awal yang dilakukan di kecamatan di karenakan ketidaktahuan.

4. Mekanisme Pelaksanaan PKH di Kecamatan Rejotangan

Mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan diatur dalam Undang-undang Dasar No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Strategi dalam mekanisme PKH adalah proses merubah pola pikir masyarakat agar generasi penerus bangsa ini bisa sehat dan cerdas, dengan generasi yang cerdas dan sehat maka kemiskinan itu bisa teratasi dengan sendirinya.

Berdasarkan studi dokumentasi berupa buku pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan Program PKH di kecamatan Rejotangan, Hasil wawancara, dan observasi di lapangan dapat diketahui tentang mekanisme pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Rejotangan. Mekanisme pelaksanaan PKH adalah:

Tahap Persiapan (Identifikasi Masalah)

1. Sosialisasi Awal Program
2. Pendataan RTSM
3. Refleksi Kemiskinan (RK)
4. Pemetaan Swadaya (PS)

Tahapan Perencanaan (Rencana Pemecahan Masalah)

1. Pembentukan LKM
2. Penyusunan PJM/ Pronangkis
3. Pengorganisasian KSM

Mekanisme pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan kepada RTSM untuk mengurangi beban mereka lewat bantuan tunai langsung yang mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah membantu pengeluaran RTSM dengan bantuan uang tunai dan jangka panjangnya adalah dengan mempersiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana dan setiap program mempunyai masalah yang masing-masing sehingga penanganannya biasanya dikembalikan kepada masing-masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses

implementasi program. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program, tentunya juga akan menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi program. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan.

a. Program Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH

Arah program pengentasan kemiskinan melalui PKH ini mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan dari output atau keluaran yang akan di dapatkan. Output dari pengentasan kemiskinan ini memang hasilnya tidak secara langsung melainkan memerlukan waktu jangka panjang. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (RTSM) tentang akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan sesuai konsep implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Howlett dan Ramesh (1995) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "proses dimana program atau kebijakan itu dilaksanakan, hal ini menunjukkan perubahan rencana menjadi praktek" hal senada juga diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabitier dalam Wahab (2010) bahwa peran penting analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel 49 mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada seluruh proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud antara lain:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang dilaksanakan dikendalikan,
- 2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya,
- 3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang tepat dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat Rejotangan dimana suatu program yang memberikan jaminan pengaman sosial salah satunya melalui bantuan tunai, perlindungan anak dan merubah pola berfikir keluarga miskin akan pentingnya masa depan anak-anak mereka. Diharapkan mereka sadar bahwa masalah mereka bukan persoalan ringan yang dibutuhkan suatu usaha kerjasama untuk menanggulangi masalah mereka yaitu kemiskinan. Selanjutnya arah pengentasan kemiskinan pada komponen pelaksana bantuan pendamping tingkat pemerintah pusat, pemerintah kota/kabupaten pada masyarakat miskin sudah cukup tinggi.

b. Pengentasan Kemiskinan Melalui Kesehatan

Komponen kesehatan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Rejotangan, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Status kesehatan ibu dan anak di Indonesia kini masih belum memuaskan. Rendahnya status kesehatan ibu ini akan berdampak bukan hanya pada kesehatan ibu saja namun juga secara langsung terhadap kesehatan janin, terutama pada minggu pertama kehidupannya. Upaya peningkatan kesehatan anak harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu.

Melalui persyaratan kesehatan diharapkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta PKH akan meningkat. Sehingga program PKH sangat tepat sebagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan bagi RTSM yang kini masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh pengalaman negara-negara lain yang mengadopsi program serupa (dalam istilah asing disebut *conditional cash transfer* atau CCT) dan terbukti telah memberi dampak positif pada peningkatan status kesehatan di Kecamatan Rejotangan.

c. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan

Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap masyarakat erat kaitannya dengan sumberdaya manusia. Sebagai pelaku pembangunan, penduduk harus terus ditingkatkan kualitasnya agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pemenuhan pendidikan yang layak bagi setiap masyarakat terutama masyarakat miskin. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan Kecamatan Rejotangan dengan bukti adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu (RTSM) yang mempunyai anak di usia sekolah. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun) khususnya bagi anak-anak RTSM dan mengurangi angka putus sekolah anak.

6. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH Organisasi Pelaksana

Tim koordinasi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulungagung Kecamatan Rejotangan terdiri atas: (1) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten (2) Tingkat Kecamatan dan (3) Pendamping dan Pelaksana Kegiatan dapat dikatakan berhasil memberikan manfaat dan pendampingan yang baik terhadap masyarakat Rejotangan terutama RTSM untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini ditemukan bahwa tim pendamping atau fasilitator adalah posisi yang sangat berperan dalam mendorong, mengarahkan dan membimbing masyarakat. Jika ada persoalan dari masyarakat (RTSM) mengenai program PKH, maka pendamping atau fasilitator membantu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh RTSM penerima bantuan. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat (RTSM) bermacam-macam sebab karakter masyarakat yang berbeda memerlukan pendekatan dan kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. Disinilah terlihat peran pendamping program dalam menyelesaikan masalah masyarakat (RTSM) dan membantu kesulitan-kesulitan yang di alami RTSM selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

7. Faktor Pendukung dan Penghambat

52

Mengenai implementasi kebijakan program faktor pendukung dan faktor penghambat akan mempengaruhi proses implementasi kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung proses implementasi kebijakan program ini di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung adalah adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program keluarga harapan (PKH) guna membantu memutus rantai kemiskinan di tingkat masyarakat miskin. Selain itu faktor lain, adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial.

b. Faktor Penghambat

Penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam kegiatan di Kecamatan Rejotangan dapat ditemukan beberapa pendapat antara lain (1) rendahnya pendidikan RTSM dan sulitnya merubah pola berfikir RTSM untuk memandang pentingnya arti kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka; (2) kurang adanya komunikasi dan koordinasi antara *stakeholder* secara intens; serta (3) masih rendahnya partisipasi dari RTSM.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya hampir berjalan dengan lancar, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan

pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh efektifitas organisasi pelaksana dalam memberi pembelajaran, pendampingan, kemandirian, bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- 54
Suharsimi, Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadiman, Arif S, dkk. 2011. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Chambers, Robert. 1996. *PRA:Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius Oxfarm Yayasan Mitra Tani.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington:Congressional Quartely Press.
- Hill, Micheal. 1993. *Public Process: A Reader*. London:University of Newcastle.
- Howlett, Michael dan Ramesh M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York:Oxford University Press.
- Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemitro dan Sutystie. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Strauss, Anselm, Corbin, Juliet. 2007. *Basics of Qualitative Research*. Kamdani (Editor). 2003. Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien (Penterjemah) 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2008. *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan P&D*. Bandung. : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.